



# USULAN MEMBANGUN MEKANISME TRANSPARANSI DI ERA BPJS KESEHATAN

Muttaqien

Peneliti Pusat KPMAK Fak Kedokteran UGM



**Pusat KP-MAK**

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
MANAJEMEN ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Latar Belakang

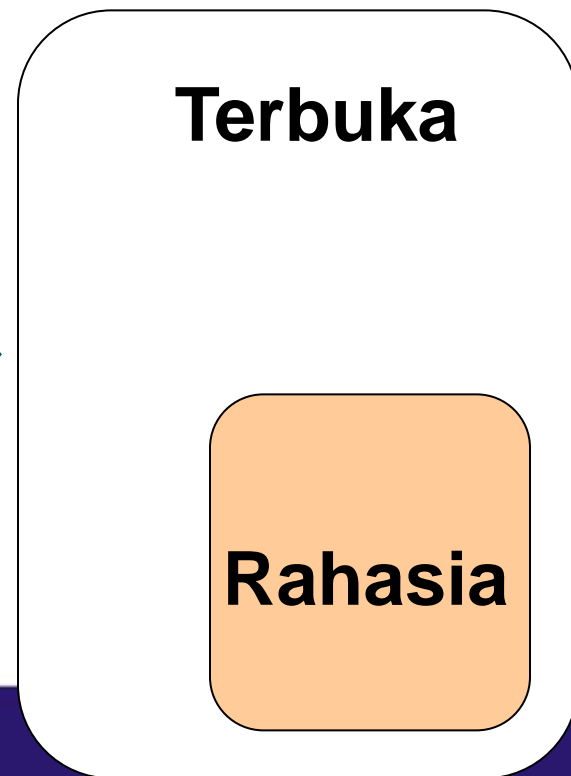
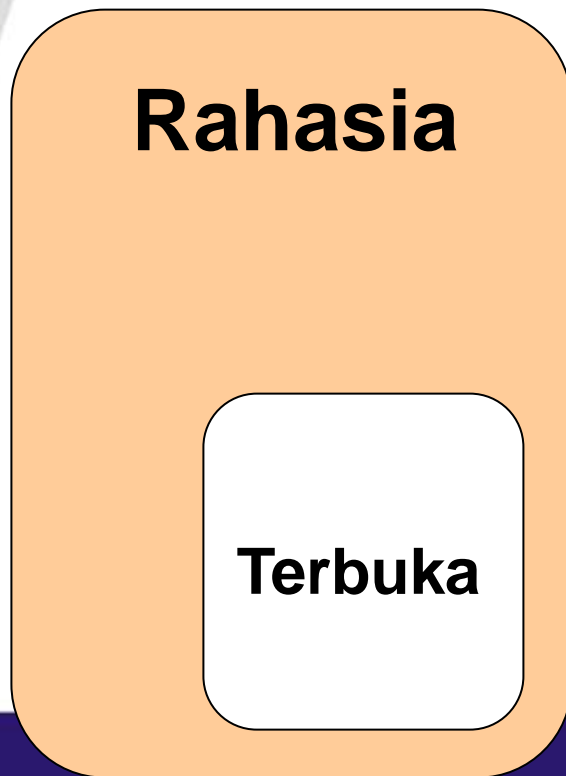
- Pasal 4 dalam UU SJSN menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional akan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan (transparansi).
- UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menentukan PT. Askes untuk menjadi pelaksana dari BPJS Kesehatan. Dengan demikian, PT. Askes yang sebelumnya adalah persero berubah menjadi badan publik, sehingga proses pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip *good governance*.



- Beberapa pasal dalam UU no 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara tidak langsung telah menjelaskan mekanisme keterbukaan yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan
- Akan tetapi, belum ada pasal yang menjelaskan bagaimana akses masyarakat terhadap dokumen di BPJS Kesehatan



# Perubahan Paradigma Dalam Memperoleh Informasi Publik



Semua rahasia,  
kecuali yang diijinkan  
untuk terbuka

Semua terbuka,  
Selain yang  
dikecualikan (rahasia)



**Pusat KP-MAK**



# PERUMUSAN MASALAH

- Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat transparansi dokumen penganggaran di badan publik daerah (dinas kesehatan)



**Pusat KP-MAK**

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
MANAJEMEN ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Metodologi

- Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode study kasus. Melakukan uji akses terhadap transparansi dokumen anggaran dan wawancara mendalam terhadap multistakeholder.



**Pusat KP-MAK**

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
MANAJEMEN ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Pembobotan Pengukuran Instrumen Uji Akses

No	Faktor Ketersediaan & Aksesibilitas Dokumen Anggaran	NILAI
1	Dipublikasikan atau disebarluaskan	5
2	Dapat diperoleh pada rentang waktu kurang dari 10 hari kerja	4
3	Dapat diperoleh dalam jangka waktu 10-17 hari kerja	3
4	Informasi/ dokumen ada tetapi tidak dapat diakses	2
5	Informasi/ dokumen tidak dibuat oleh Pemerintah Daerah	1





# KRITERIA DAN NILAI INTERVAL TRANSPARANSI DOKUMEN

No	Interval Kelas	Kriteria
1	0.81 - 1.00	Sangat Transparan
2	0.61 – 0.80	Transparan
3	0.41 - 0.60	Biasa
4	0.21 – 0.40	Tidak Transparan
5	Kurang dari 0,20	Sangat Tidak Transparan




**Pusat KP-MAK**

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
MANAJEMEN ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Hasil Nilai Transparansi Dokumen

Nama Dokumen	Skor	Nilai Transparansi
<b>TAHAP PERENCANAAN PENGANGGARAN</b>		
RPJMD	4	<b>0.73</b>
RKPD	4	
Renja SKPD Kesehatan	3	
<b>TAHAP PEMBAHASAN PENGANGGARAN</b>		
KUA PPAS	3	<b>0.53</b>
RKA – SKPD Kesehatan	3	
Rencana APBD	2	
<b>TAHAP PELAKSANAAN ANGGARAN</b>		
Perda APBD	3	<b>0,52</b>
Perkada Tentang Penjabaran APBD	3	
Perkada Tentang Perubahan APBD	2	
Perkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	
DPA SKPD Kesehatan	3	
<b>TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN</b>		
Laporan realisasi semester pertama APBD	3	<b>0.40</b>
Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	
Informasi LPPD	1	
LPPD	1	
LKPJ Pemerintah Daerah Ke DPRD	3	

# Problem Akses Dokumen Publik



No	Permasalahan
1	Salah persepsi tentang manfaat dokumen
2	Masih adanya persepsi dokumen anggaran adalah rahasia negara
3	UU Keterbukaan Informasi Publik belum tersosialisasi
4	Prosuderal perizinan yang rumit
5	Ketidakjelasan penanggungjawab dokumen



**Pusat KP-MAK**

# Transparansi Dokumen Anggaran


1. Belum menjalankan ketentuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.
2. Sistem informasi yang dikembangkan masih bersifat pasif. Pemerintah daerah tidak bersifat aktif
  - Kota Yogyakarta mempublikasikan semua dokumen penganggaran
  - Kota Surakarta membuat poster APBD yang disebar
  - Porto Aleggere mencetak booklet terkait anggaran 2 kali setiap tahun dan disebar ke masyarakat umum
  - Naga City mempublikasikan di website yang terus di upate



**Pusat KP-MAK**

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
MANAJEMEN ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# KESIMPULAN



Transparansi di badan publik kesehatan daerah memiliki perbedaan tingkat transparansi di setiap tahapan penganggaran. Semakin masuk dalam proses penganggaran, maka dokumen anggaran semakin sulit didapatkan.



**Pusat KP-MAK**

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
MANAJEMEN ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Saran

- Semua dokumen BPJS Kesehatan harus terbuka untuk publik (*open to accses*), tidak hanya untuk Dewan Pengawas dan DJSN. Ketentuan tersebut diberlakukan dari setiap proses yang ada di BPJS dan diberlakukan dari tingkat pusat sampai tingkatan terkecil.
- Untuk menjawab permintaan masyarakat agar tidak ada keterlambatan dalam memberikan dokumen di BPJS Kesehatan, maka harus ditunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di BPJS Kesehatan.



**Pusat KP-MAK**

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
MANAJEMEN ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# APBD BUKAN RAHASIA NEGARA



**MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN DOKUMEN APBD  
TANPA KESULITAN  
TANPA PROSES YANG BERBELIT BELIT  
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

